

IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PEMANFAATAN KOLAM RETENSI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jeany Rahma Alay Saputri

NPP. 30.0339

Asdaf Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

E-mail: jeanyrahmaas@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. M. Amin, MM., M.Ak

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Flood is one of the disasters that often occurs in Palembang. Floods in Palembang are caused by high rainfall and inadequate catchment areas due to developments that are above the water flow area causing many puddles to appear until a flood disaster occurs. **Purpose:** The purpose of this study was to know implementation policies regarding the implementation of flood disaster structural mitigation in the city Palembang through the use of retention ponds carried out by Palembang City Public Works and Spatial Planning Office. **Methods:** The theory that the writer uses is the implementation theory put forward by Grindle with 2 dimensions, namely policy content and policy environment. The research method used is descriptive qualitative method. The focus of the research as to describe how the implementation policies regarding the implementation of flood disaster structural mitigation in Palembang South Sumatera using retarding ponds. **Result:** The result of this study are implementatitons policies regarding retention ponds carried out by Palembang public works and spatial office is done through the construction of retention ponds, periodic maintenance of retention ponds and also outreach to the community regarding the main function and importance of the existence of retention ponds in the city of Palembang. Socialization to the community is intended to get full support from the community in building retention ponds and community participation in maintaining retention ponds. Retention pond maintenance is carried out by cleaning the pond regularly, dredging pond sediments, cleaning pumps and floodgates periodically. **Conclusion:** The implementation of flood disaster mitigation through the use of retention ponds which are under the responsibility of the Public Works and Spatial Planning Office for Water Resources, Irrigation and Wastewater has proven to be going well, but the quality of the existing retention ponds must be improved and the number of retention ponds required continues to be maximized to reach the amount recommended by various studies that have been carried out.

Keywords: Implementation, Flood, Retention Pool, PUPR Service.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di kota Palembang. Banjir di kota Palembang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan daerah resapan yang tidak memadai dikarenakan pembangunan yang berada diatas area aliran air menyebabkan banyaknya genangan yang muncul hingga terjadilah bencana banjir. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah pengimplementasian kebijakan mengenai pelaksanaan mitigasi struktural bencana banjir di kota Palembang melalui pemanfaatan kolam retensi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengimplementasian kebijakan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi dan hambatan dalam pengimplementasian mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi. **Hasil/Temuan:** implementasi mitigasi bencana banjir dilakukan melalui pembangunan kolam retensi, perawatan berkala kolam retensi dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi utama dan pentingnya keberadaan kolam retensi di kota Palembang. pembangunan dan perawatan kolam retensi di kota Palembang dilakukan secara berkala oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta beberapa dinas lain yang terkait. sosialisasi kepada masyarakat dimaksudkan untuk mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam pembangunan kolam retensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kolam retensi. perawatan kolam retensi dilakukan dengan pembersihan kolam secara berkala, pengerukan sedimentasi kolam, pembersihan pompa dan pintu air secara berkala. **Kesimpulan:** Implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah terbukti berjalan secara baik namun harus ditingkatkan kualitas kolam retensi yang telah ada dan juga terus dimaksimalkan jumlah kolam retensi yang dibutuhkan hingga mencapai jumlah yang direkomendasikan oleh berbagai penelitian yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci : Implementasi, Banjir, Kolam Retensi, Dinas PUPR.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan sumber atau penyebabnya, bencana yang sering terjadi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi. Setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana banjir terutama daerah perkotaan yang memiliki tingginya kepadatan penduduk. Permasalahan yang kerap terjadi di perkotaan seperti tata ruang kota yang tidak ramah aliran air, sedimentasi pada aliran air dan lain-lain adalah beberapa faktor penyebab timbulnya permasalahan banjir di perkotaan. Salah satu kota yang sering terjadi banjir ialah kota Palembang. Kota Palembang juga tidak luput dari permasalahan banjir ini. Banjir yang terjadi di kota Palembang biasanya disebabkan oleh banjir pasang musiman ataupun banjir genangan yang disebabkan oleh lebatnya hujan yang turun disertai pula dengan drainase yang buruk. Banjir sendiri dapat menyebabkan berbagai kerugian seperti hilangnya harta benda, munculnya korban jiwa, merusak sarana dan prasarana hingga merusak tatanan kehidupan masyarakat. Banjir dapat disebabkan sejumlah faktor seperti curah hujan yang lebat, saluran drainase buruk, rusak atau hancurnya retensi daerah aliran sungai (DAS), pendangkalan sungai serta kurangnya daerah resapan air karena tata wilayah yang tidak beraturan hingga kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan dibangunnya kolam retensi yaitu kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya adalah untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai. Berbagai kejadian dan permasalahan diatas sebagai gagasan dalam pembangunan kolam retensi untuk menambah daerah resapan air dengan bantuan program pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani banjir.

kota Palembang memiliki curah hujan yang cukup tinggi di Oktober s/d April, hal utama yang menyebabkan banjir di kota Palembang adalah curah hujan ditambah drainase yang buruk. Curah hujan di kota Palembang tentunya sangat bervariasi, dimulai dari hujan kecil dengan debit air yang sedikit, hujan sedang dengan debit air yang normal hingga hujan lebat dan sangat lebat yang tentunya membawa debit air yang berlebih atau sangat banyak. Hal ini tentunya memiliki hubungan dengan daya serap tanah di kota Palembang, terlebih saat air tidak bisa diserap dengan baik dikarenakan rusaknya daerah resapan air menyebabkan air yang tidak dapat diserap tanah ini terhitung dalam jumlah yang berlebih dari biasanya sehingga sungai pun meluap dan terjadilah genangan air yang biasa kita sebut sebagai banjir. Dikarenakan daya tampung sungai yang tidak lagi bisa menahan debit air yang masuk dari curah hujan yang tinggi dan tidak dapat diserap oleh tanah maka alternatif penampungan air selain sungai sangat dibutuhkan.

Sesuai prinsip otonomi daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola daerahnya sendiri dan mengelola sumber daya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai pada aturan undang-undang, demi mencapai kesejahteraan umum. Dengan asas otonomi tersebut daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan sebuah pembangunan dan memajukan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan menghasilkan berbagai cara alternatif untuk mengatasi permasalahan di daerah terkait.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah urusan pemerintah wajib yang menyediakan salah satu layanan mendasar dan mengkoordinasikan masalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dinas PUPR harus menjalankan tanggung jawab utamanya sebagai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan yang unggul dan menjamin kesejahteraan daerah.

Pemerintah kota telah membangun sebanyak 49 buah kolam retensi dengan luas terkecil yaitu kolam retensi di Telkom Lemabang dengan luas 687 m² hingga yang terbesar mencapai 200.000 m² di Gor Jakabaring yang telah tercatat di Dinas PUPR Kota Palembang sebagai suatu cara alternatif untuk menampung debit air yang masuk ketika hujan lebat terjadi guna mengurangi bencana banjir yang sering terjadi di berbagai titik. Kolam retensi dibangun tentunya dengan tujuan memotong puncak banjir pada badan air/sungai sebagai bentuk pengendalian serta mengantisipasi terjadinya bencana banjir di kota Palembang. Hujan dengan intensitas tinggi sering terjadi dan semakin buruknya kondisi sungai sebagai penampung utama air hujan dikarenakan ulah masyarakat seperti buang sampah sembarangan, menyebabkan pendangkalan dan pengurangan kapasitas penampungan air di sungai. Hal ini perlu diantisipasi dengan menambah daerah resapan dan penampungan sementara air seperti kolam retensi agar tidak terjadi genangan air yang berlebih. Dinas PUPR sudah menjalankan berbagai usaha dalam penanggulangan dan meminimalisir banjir di kota Palembang, namun permasalahan banjir masih terjadi di berbagai titik di kota Palembang dikarenakan ketidakmampuan sungai dalam menampung debit air dan kurangnya daerah resapan di kota Palembang. Oleh karena itu, penggunaan cara alternatif dengan membangun kolam retensi penting dilakukan untuk mengurangi dampak dan kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh banjir ketika curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih tema dan judul mengenai “Implementasi Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pemanfaatan Kolam Retensi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pemanfaatan Kolam Retensi di Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan seperti biaya pembangunan kolam retensi, kurangnya sumber daya yang terlibat, tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang rendah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu seperti Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu yang berfokus kepada bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar yaitu fasilitas umum yang bertujuan sebagai pengendali banjir. Pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini fasilitas umum pengendali banjir dapat mengalami beberapa hambatan seperti dalam penelitian ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhambatan dikarenakan keterbatasan dana (Candra dkk,2019).

Penelitian selanjutnya yaitu Kajian Penanggulangan Banjir dengan Menggunakan Kolam Retensi (Studi Kasus Sungai Lamasi Kabupaten Luwu) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang paling tepat dalam pengendalian banjir di sungai lamasi adalah dengan membangun kolam retensi dengan pertimbangan biaya pembebasan lahan yang bisa dihindari karena kolam retensi dibangun diatas lahan sungai yang berpindah-pindah (Aisyah dkk,2021). Penelitian lainnya yaitu Efektivitas Kolam Retensi Terhadap Pengendalian Banjir dimana penelitian ini menghasilkan bahwa kolam retensi yang telah ada harus diperbesar lagi daya tampungnya agar pemanfaatannya dalam penanggulangan banjir dapat berfungsi maksimal (alexander dkk, 2020).

Penelitian lainnya yaitu Kajian Efektivitas Kolam Retensi Dalam Mereduksi Banjir Jalan Raya Porong Kabupaten Sidoarjo dengan Storm Water Management Model dimana hasil simulasi kolam retensi menggunakan permodelan EPA SWMM 5.1 diketahui kolam retensi eksisting belum dapat menampung debit limpasan dengan kala ulang hujan 5 tahun yang disimulasi selama 6 jam waktu running. Didapat hasil Analisa efektivitas kolam retensi eksisting dengan kemampuan tampungan efektif sebesar 94.372,9 m³ dengan efektivitas kolam sebesar 74,48% dalam mereduksi limpasan air (Khoiri dkk,2022).

Penelitian terakhir yaitu Upaya Pengendalian Bencana Banjir Melalui Kolam Retensi di Aliran Sungai Pangian dimana banjir diatasi dengan menggunakan kolam retensi sebagai tindak mitigasinya (ZS,2022)

Penelitian terdahulu diatas menjadi acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian dari topik dan tema yang telah peneliti tentukan. Dari penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul yang telah peneliti pilih.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni mengetahui bagaimana mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang di implementasikan. Penelitian ini fokus kepada kebijakan yang telah di laksanakan dan menilai bagaimana kebijakan ini berjalan. Perbedaan juga terdapat pada indicator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Grindle yang dikutip oleh (Winarno,2012) yang menyatakan bahwa implementasi dapat dilihat melalui 2 dimensi yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang provinsi Sumatera Selatan berjalan.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada mitigaai bencana banjir. Pendekatan induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas akan lebih mengecil atau lebih spesifik, termasuk

mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode observasi dan wawancara termasuk dalam sumber data primer sedangkan catatan, dokumentasi serta bukti lainnya termasuk dalam sumber data sekunder dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang didapat menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam menganalisis masalah yang ada dalam implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah hubungan yang melancarkan beberapa tujuan kebijakan agar dapat dilaksanakan sebagai pengaruh dari tindakan pemerintahan. Mitigasi dapat diartikan sebagai bentuk pengurangan risiko dari suatu bencana. Mitigasi dapat berarti upaya yang dapat dilakukan melalui sebuah program pembangunan baik secara fisik bangunan maupun sosialisasi penyadaran mengenai bencana maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi suatu bencana. Mitigasi dapat dilakukan secara struktural dan non struktural dan kolam retensi di kota Palembang merupakan salah satu mitigasi struktural yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara ketika terjadi hujan dengan curah tinggi di kota Palembang. Dalam pelaksanaannya tentu mengalami berbagai hambatan yang berasal dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan pengamatan terhadap implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan dasar teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (dikutip oleh Winarno, 2012) dengan memperhatikan peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.1 Tipe Manfaat

Dalam mekanisme teknisnya kolam retensi akan bermanfaat dalam menampung sementara air yang tidak terserap oleh tanah dan tidak tertampung oleh sungai dan pada akhirnya perlahan-lahan akan di alirkan kembali ke sungai secara bertahap. Sejalan dengan tempat berdirinya kolam retensi yang berada di lingkungan publik maka manfaat lain yang berdampak pada masyarakat maupun yaitu pariwisata dan perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi serta observasi langsung pada saat penelitian berlangsung, kolam retensi di kota Palembang memiliki setidaknya 4 manfaat :

1. Pengendali banjir
2. Konservasi air
3. Tempat pariwisata
4. Olahraga air

Kolam retensi Kambang Iwak yang beralamat di Jalan Tasik, Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang merupakan salah satu kolam retensi yang bermanfaat dalam 4 aspek tersebut. Selain bermanfaat dalam penanggulangan bencana banjir di area terdekat kolam retensi Kambang Iwak, kolam retensi tersebut juga dijadikan tempat konservasi berbagai jenis ikan, taman bermain anak, tempat berolahraga hingga sarana rekreasi. Para masyarakat juga diperbolehkan berdagang di sekitar area kolam retensi sehingga adanya kolam retensi ini juga menjadi sumber pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Danau OPI Jakabaring juga menjadi salah satu contoh kolam retensi dengan tipe manfaat lain yaitu tempat olahraga air seperti banana boat dan lain sebagainya.

Kolam retensi di kota Palembang telah mencapai 4 manfaat yang disebutkan namun belum seluruhnya terealisasi dengan baik. Berbagai kendala dihadapi dalam memberikan manfaat yang memadai seperti kondisi kolam yang tidak terawat, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dan lain sebagainya.

3.2 Derajat Perubahan yang Diinginkan

Kolam retensi yang dibangun dan dipelihara tentunya memiliki tujuan untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. Tujuan dibangunnya kolam retensi adalah untuk mengurangi intensitas bencana banjir dan juga jumlah genangan di kota Palembang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasannya jumlah kasus banjir di kota Palembang tidak menentu setiap tahunnya. Jumlah kasus banjir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan yang tidak konsisten, indeks perkembangan banjir setelah implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang belum menghasilkan derajat perubahan yang diinginkan dengan maksimal dikarenakan belum tercapainya jumlah dan kondisi kolam retensi yang ideal.

Kolam retensi yang berada di Kawasan publik di kota Palembang menimbulkan berbagai budaya baru sejalan dengan fungsi kolam retensi yang bukan hanya untuk penanggulangan banjir namun juga menjadi tempat konservasi air, pariwisata dan juga olahraga. Rata-rata kolam retensi yang ada di kota Palembang biasanya dilengkapi dengan taman-taman, sarana olahraga, fasilitas umum dan berbagai satwa air menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kota Palembang sehingga menjadikan kolam retensi ini sebagai salah satu tempat yang ramai di kunjungi. Budaya baru ini menimbulkan dampak yang baik maupun yang buruk bagi keadaan kolam retensi dengan fungsi utama yaitu sebagai bentuk penanggulangan banjir. Budaya baru yang berdampak baik seperti peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui berjualan di sekitaran kolam retensi, masyarakat yang suka berolahraga dan pemanfaatan sarana publik yang telah disediakan tentunya tidak menjadi masalah bagi implemmentasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi, namun di sisi lain ramainya pengunjung di area kolam retensi menimbulkan banyak sampah, rusaknya fasilitas umum serta membuat petugas yang berada di kolam retensi kewalahan dalam pemeliharaan kolam retensi. Sebagai contoh, ramainya pengunjung di kolam retensi menyebabkan tidak terkendalinya jumlah sampah yang ada, dan banyak dari pengunjung membuang sampah ke kolam retensi sehingga menyebabkan fungsi utama kolam retensi terganggu.

Derajat perubahan yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya kepekaan masyarakat dalam menjaga kolam retensi sebagai bentuk mitigasi bencana banjir, sedimentasi kolam yang tidak dapat dihindari, serta kurangnya peran pemerintah setempat dalam mengedukasi masyarakat mengenai kolam retensi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan ini.

3.3 Letak Pengambilan Keputusan

Pembangunan kolam retensi di suatu daerah melalui banyak tahapan serta survey yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan berpedoman pada modul yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana modul ini berisi mengenai ketentuan umum dan ketentuan teknis dalam pembangunan kolam retensi.

Dalam proses pengambilan keputusan implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang memiliki tim yang bertugas untuk mengobservasi secara langsung daerah atau lokasi yang akan dibangun kolam retensi. Secara garis besar ketentuan yang ditetapkan mengacu pada kondisi fisik dan kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut, maka dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan dan juga pemeliharaan harus mengacu pada kedua aspek tersebut. Kondisi fisik dan kondisi sosial masyarakat di tempat tersebut akan menimbulkan hambatan dan juga faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini telah mengelola sebanyak 47 kolam retensi di kota Palembang. Berdasarkan observasi penulis selama melakukan penelitian dan juga informasi yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak seluruh kolam retensi yang dikelola berada dalam kondisi baik dan terawat. Dari data yang diberikan serta observasi langsung kelapangan yang telah dilakukan, tidak semua kolam retensi yang ada

terpantau kondisi fisiknya, beberapa kolam retensi terdata tidak terawat bahkan ada yang tidak terdata bagaimana kondisi fisiknya. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan seperti sumber daya dari Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang yang kurang, perilaku masyarakat, sedimentasi alami, peristiwa alam dan lainnya dalam pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi sehingga kolam yang telah ada tidak terdata kondisinya, kolam mengalami kerusakan dan menyebabkan kolam retensi tidak berfungsi secara maksimal. Pengambilan keputusan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang telah berjalan sesuai ketentuan yang diberikan namun faktor lain juga menjadi penentu berhasil atau tidaknya implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi tersebut.

3.4 Sumberdaya yang Dikerahkan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang bekerja sama dengan beberapa Dinas dan Pihak Swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi. Berikut dijelaskan mengenai sumberdaya yang dikerahkan dalam kedua aspek tersebut.

- Dalam Pembangunan Kolam Retensi

Dalam pembangunan kolam retensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bekerja sama dengan Pihak Swasta seperti PT. Karya Kita Bumi Pertiwi, Perusahaan Nindya Karya dan lain sebagainya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membentuk sebuah tim yang ditugaskan untuk meneliti mengenai daerah yang akan dibangun apakah sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan atau tidak. Sedangkan pihak swasta berperan sebagai eksekutor pembangunan dari kolam retensi tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dan mengawasi jalannya pembangunan kolam retensi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemerintah dan pihak swasta.

- Dalam Pemeliharaan Kolam Retensi

Kolam retensi yang berada di kawasan publik tentunya tidak sepenuhnya terkontrol oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ditambah dengan fasilitas lain yang tersedia di sekitar kolam retensi seperti taman, tempat rekreasi dan olahraga serta tempat kuliner. Banyak aspek yang harus diperhatikan selain terjaganya kondisi kolam retensi itu sendiri, keamanan dan juga kebersihan lingkungan sekitar kolam retensi juga harus diperhatikan agar fungsi kolam retensi tetap terjaga dengan lingkungan yang kondusif.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di kolam retensi yang dijadikan tempat wisata terdapat personil Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa petugas lingkungan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup yang memang ditugaskan di wilayah tersebut. Sehingga betul bahwasannya dalam pemeliharaan kolam retensi sumber daya yang dikerahkan bukan hanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang namun juga terdapat dinas lain. Masyarakat juga menjadi salah satu yang terlibat dalam pemeliharaan kolam retensi melalui Peraturan Walikota Palembang No. 14 Tahun 2019 Tentang Gotong Royong mulai dari tingkat kota hingga gotong royong mandiri.

Selain sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi juga di perlukan sumber daya fisik yaitu dana atau uang. Dalam pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi dana yang digunakan berasal dari APBD namun terkhusus dalam pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang mengalami kendala yaitu kekurangan dana, sehingga dalam implementasinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan dana dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya pembangunan kolam retensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000 per hektar.

3.5 Strategi Aktor Terlibat

Aktor utama yang terlibat dalam implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang, dalam implementasi kebijakan ini tentunya menemui banyak hambatan yang berasal dari masyarakat

maupun kondisi daerah yang membutuhkan kolam retensi. Maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi atau cara-cara yang dibuat untuk mengatasi hambatan yang muncul.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi terdapat beberapa hambatan yang sering ditemui seperti :

1. Masyarakat yang menolak lahannya dijadikan kolam retensi
2. Harga ganti rugi lahan yang tidak sesuai kemauan masyarakat
3. Masyarakat sekitar kolam retensi yang tidak peduli lingkungan
4. Masyarakat sekitar kolam retensi yang kurang teredukasi terkait kebersihan lingkungan dan pentingnya kolam retensi
5. Pengawasan kolam retensi yang sulit di maksimalkan

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun strategi yang telah direncanakan dalam memaksimalkan pembangunan serta pemeliharaan kolam retensi di kota Palembang.

Strategi yang disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang berkisar pada sosialisasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam pemeliharaan kolam retensi secara langsung. Untuk pembangunan kolam retensi yang terhambat pada pembebasan lahan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang adalah melakukan pendekatan dan negosiasi harga ganti rugi hingga menemukan kesepakatan dengan masyarakat yang dimaksud.

Dapat disimpulkan bahwa setiap hambatan yang muncul telah ditanggulangi dengan strategi para aktor yang terlibat walaupun selama melaksanakan penelitian tidak semua strategi yang dimaksud telah dilaksanakan sehingga hambatan yang ada belum teratasi dengan maksimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan.

3.6 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi tidak lepas dari peran masyarakat setempat dalam mendukung ataupun menghambat jalannya hal tersebut. Kepatuhan dan daya tanggap masyarakat sekitar kolam retensi sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun lingkungan kolam retensi. Masyarakat yang patuh dan memiliki daya tanggap tinggi akan menjadikan kolam retensi berfungsi secara maksimal dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar kolam retensi. Hal ini juga terkait bagaimana Pemerintah mengedukasi masyarakat dan secara intens mengenalkan masyarakat dengan pentingnya pembangunan kolam retensi, peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar lokasi pembangunan dan kolam retensi. Masyarakat yang tidak patuh dan tidak memiliki daya tanggap tinggi akan menghambat fungsi utama kolam retensi karena budaya hidup yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan penulis juga dapat menyimpulkan bahwa kolam retensi yang berada di kawasan yang bersih dan teratur kondisi fisiknya jauh lebih baik dan lebih terawat serta memiliki fungsi yang masih maksimal. Berbanding terbalik dengan kolam retensi yang berada di kawasan yang kotor dan kumuh biasanya memiliki kondisi fisik yang tidak baik dan sudah tidak berfungsi maksimal. Sama halnya dengan lingkungan yang masyarakatnya teredukasi dengan baik biasanya akan lebih mudah dikelola dan dibenahi dan tidak muncul hambatan yang berarti baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan kolam retensi di daerahnya.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan dilaksanakannya mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang memberikan dampak yang positif kepada masyarakat kota Palembang. Selain bermanfaat sebagai pengendali banjir, kolam retensi juga bermanfaat dalam perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Temuan yang penulis dapatkan yaitu masih belum maksimalnya pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi di kota Palembang sehingga diperlukan peningkatan kedepannya. Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat serta

kapasitas pemerintah kota Palembang juga harus ditingkatkan seiring dengan dinamisnya kondisi sosial dan lingkungan di kota Palembang.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Kolam retensi masih kurang dimaksimalkan manfaatnya oleh pemerintah kota Palembang. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kolam retensi pun masih belum maksimal.

IV. KESIMPULAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang. penelitian ini dilakukan sejak tanggal 6 Januari 2023 hingga 21 Februari 2023.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan baik namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor yang belum dimaksimalkan dalam mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi yang disebabkan oleh beberapa hambatan yang ada. Hal tersebut dibuktikan oleh 2 dimensi yang dibawa oleh Grindle dikutip oleh Winarno, 2012 yaitu :

a. Isi kebijakan

Implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilihat dari dimensi isi kebijakan telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Isi kebijakan yang memuat mengenai pelaksanaan mitigasi secara struktural dengan memanfaatkan kolam retensi dalam penanggulangan bencana banjir ini telah berorientasi pada kepentingan umum dan berjalan sesuai tujuannya, namun berbagai faktor hambatan yang berasal dari masyarakat dan juga kurangnya sumber daya dari pemerintah yang mengelola kolam retensi ini menyebabkan fungsi utama kolam retensi terganggu. Isi kebijakan mengenai mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi ini belum menghasilkan manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan secara maksimal dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi sering terbentur dengan permasalahan biaya, respon masyarakat dan juga keterbatasan tenaga ahli dalam perawatan kolam retensi sehingga muncul kerusakan-kerusakan yang terjadi di fisik kolam seperti sedimentasi yang berlebihan, pintu air yang rusak dan dipenuhi sampah dan pompa air yang tidak terawat. Se jauh ini belum dilakukan peningkatan perawatan secara maksimal terbukti dengan beberapa kolam retensi mengalami kerusakan dalam skala ringan hingga berat hingga menyebabkan fungsi kolam retensi tidak sepenuhnya berjalan.

b. Lingkungan kebijakan

Implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang dilihat melalui dimensi lingkungan kebijakan telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Penerapan regulasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kolam retensi telah dilaksanakan dibantu oleh Dinas lain yang berperan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang juga telah memanfaatkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang gotong royong agar masyarakat ikut serta berperan aktif dalam pemeliharaan kolam retensi. Dalam pelaksanaan mitigasi ini masih ditemukan hambatan yang berasal dari masyarakat baik dalam proses pembangunan dan pemeliharaan karena kepekaan dan daya tanggap masyarakat yang masih kurang dalam kepedulian terhadap lingkungan.

2. Faktor penghambat dalam implementasi mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kota Palembang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu dana pembangunan kolam retensi yang besar sehingga harus menunggu bantuan pemerintah pusat dan corporate social responsibility, kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi; terbatasnya jumlah petugas lapangan dalam pemeliharaan kolam retensi; keterbatasan pengawasan dan pemeliharaan secara intensif oleh pihak terkait; peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan fisik kolam retensi di luar kendali manusia.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; mengajak masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan berdasar pada peraturan walikota; bekerjasama dengan Dinas lain dalam pemeliharaan kolam retensi; dan melakukan pendekatan dengan pemanfaatan kearifan local dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan di beberapa kolam retensi di kota Palembang dari total seluruh kolam retensi yang ada sebagai contoh dan model pendapat Grindle dalam Winarno.

Arah Masa Depan (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena ini penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam pada lokasi dan tempat serupa berkaitan dengan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan kolam retensi di kawasan kota Palembang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk meneliti dan mendapatkan data-data terkait dalam penyusunan penelitian ini. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, D. (2015). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: konsep dan aplikasi proses kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: alfabeta CV.

n, c. w. (2008). *disaster management : a disaster manager's handbook* . Manila: asian development bank.

a, l. j. (2012). *metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)* . Bandung: pt remaja posda karya.

c, b. d. (1990). *qualitative research for education terjemahan munandir*. Jakarta: UNJ.

hamdi, m. (2014). *kebijakan publik : proses, analisis, partisipasi*. Jakarta: farmforum.

Isril, M. T. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2.

suripto, c. s. (2011). *menilai kinerja pemerintah daerah*. Bandung: FOKUSMEDIA.

w, c. j. (2019). *research design : pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (edisi 4)* . Yogyakarta: pustaka belajar.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: CAPS.

Ali, A. M., Musa, R., & Mallombasi, A. (2021). Kajian Penanggulangan Banjir dengan Menggunakan Kolam Retensi (Studi Kasus Sungai Lamasi Kabupaten Luwu). *Jurnal Teknik Sipil MACCA*, 18–25.

<http://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/jtsm/article/view/275%0Ahttps://jurnal.ft.umi>

ac.id/index.php/jtasm/article/download/275/168

Hermawan, C., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu. *EJournal Ilmu Pemerintah*, 7(1), 465–478.

Pramono, A. N., & Saputro, P. T. (2021). Efektivitas Kolam Retensi Terhadap Pengendalian Banjir. *G-Smart*, 4(2), 94.
<https://doi.org/10.24167/gsmart.v4i2.2331>

Z, S. (2022). Kolam Retensi Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Batang Pangian. *Rang Teknik Journal*, 5(1), 124–136.
<https://doi.org/10.31869/rtj.v5i1.2856>

Khoiri, A. H., Andawayanti, U., & Haribowo, R. (2022). *Kajian Efektivitas Kolam Retensi Dalam Mereduksi Banjir Jalan Raya Porong Kabupaten Sidoarjo dengan Storm Water Management Model*. 2(2), 142–155.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023

Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang